

**Hambatan Implementasi *Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* Terhadap**

Kasus *Femicide Intimo* di Meksiko Tahun 2015-2020



SKRIPSI

*Disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

Jenniver

45 18 023 069

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**OHAMBATAN IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)***

TERHADAP KASUS *FEMICIDE INTIMO* DI MEKSIKO TAHUN 2015-

2020

Jenniver

4518023069

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

BOSOWA

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A.



Rosnani, S.Ip., M.A.

Mengetahui :

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.



Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Senin Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2022 Skripsi dengan Judul **HAMBATAN IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* TERHADAP KASUS *FEMICIDE INTIMO* DI MEKSIKO TAHUN 2015-2020**

Nama : **JENNIVER**
Nomor Stambuk : **4518023069**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pengawas Umum :


Arief Wicaksono, S.IP., MA

Panitia Ujian :


Muh. Asy'ari, S.IP., MA
Ketua


Rosnani, S.IP., MA
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Beche BT. Mamma, S.IP., MA (.....)
2. Zulkhair Burhan, S.IP., MA (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberi kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa serta jajarannya.
3. Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., MA selaku ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Bosowa.
4. Bapak Muh. Asyary, S.Ip., MA sebagai pembimbing I dan Ibu Rosnani, S.Ip., MA sebagai pembimbing II yang telah menuntun sekaligus memberikan pengalaman, masukan, saran yang sangat berguna selama penulis penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa.
6. Ucapan terimakasih yang teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Lusia Loto' dan Ayahanda Peri Nani atas semua kasih sayang dan cinta dalam membesarkan penulis, terimakasih atas doa serta kerja kerasnya sehingga penulis dapat berkuliah sampai menyusun skripsi. Semuanya tidak dapat

penulis gantikan, namun penulis sebisa mungkin melakukan yang terbaik meski tidak sempurna. Saudara-saudara dari penulis, Kak Winny, Kak Jhois, Valerya, Pabel, terimakasih atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis.

7. Kepada teman-teman HI angkatan 2018, khususnya Ranti, Lopi, Vira, Afni dan Isra menjadi teman baik penulis selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi, dan juga kepada teman-teman KKN penulis, khususnya Indri dan Hikma glad to know you guys semoga pertemanan selama KKN bisa terus terjalin. Kepada kak Eka, terimakasih kak atas saran-saran dalam menyusun skripsi.

8. To Mexico, I believe it can be better. Skripsi ini mungkin tidak akan menjadi tulisan yang dapat men gubah situasi yang terjadi di Meksiko, namun dengan menulis ini penulis menjadi saksi. Penulis menggunakan skripsi ini mewakili semua korban dan keluarga yang memperjuangkan hak dan keadilannya.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
1. Batasan Masalah.....	7
2. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Jenis dan Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengambilan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	12
F. Rencana Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	14

1. Impunitas.....	14
2. Impunitas dan <i>Femicide Intimo</i>	15
BAB III: GAMBARAN UMUM	19
1. <i>Femicide Intimo</i>	19
2. Upaya Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi CEDAW ...	26
BAB IV: HAMBATAN IMPLEMENTASI CEDAW DALAM PENYELESAIAN <i>FEMICIDE INTIMO</i> DI MEKSIKO.....	28
1. Lambatnya Upaya Investigasi, Mengadili dan Menghukum Pelaku <i>Femicide Intimo</i>	28
2. Sulitnya Mengidentifikasi Korban dan Pelaku <i>Femicide Intimo</i> ...	34
3. Tidak Efektifnya Langkah Pemerintah Meksiko dalam Mencegah <i>Femicide Intimo</i> dan Pemulihan bagi Korban.....	35
4. Minimnya <i>Political Will</i> Pemerintah Meksiko dalam Menjalankan Rekomendasi CEDAW	37
BAB V: PENUTUP.....	42
1. Kesimpulan	42
2. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) terhadap kasus *femicide intimo* di Meksiko. *Femicide Intimo* merupakan kejahatan berat dalam hak asasi manusia yang masih terjadi Meksiko, diratifikasinya CEDAW oleh Pemerintah Meksiko dianggap sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi *femicide intimo*. Namun, implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) di Meksiko terhambat mengakibatkan *femicide intimo* masih terjadi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka. Dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep impunitas. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yaitu diantaranya masih terjadi impunitas di Meksiko, intervensi kartel narkoba, dan budaya *machismo* yang masih diadopsi di Meksiko. Dalam hal ini pemerintah belum memiliki rencana yang strategis dalam mengimplementasikan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) secara berkelanjutan.

Kata kunci: *femicide intimo*, Meksiko, kekerasan terhadap gender, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Femicide didefinisikan sebagai pembunuhan wanita sebagai *hate crime*. *Femicide* merupakan istilah yang berasal untuk menggambarkan pembunuhan yang berkaitan dengan gender. *Femicide* juga mencakup serangkaian penyerangan gender secara publik maupun pribadi hal ini terkait dengan dan dalam sebagian besar kasus terdiri dari *Intimate Partner Violence*. Pada tingkat nasional dan komunitas, *femicide intimo* atau *Intimate Partner Violence* (IPV) biasanya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat dengan tingkat kejahatan yang tinggi, kurangnya kesempatan ekonomi bagi laki-laki, norma budaya yang mendukung kekerasan, maupun diskriminasi publik terhadap perempuan (Shackerlford, 2020).

Kata *femicide* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kejahatan terhadap wanita, kematian wanita dengan cara kekerasan adalah bentuk kejahatan itu sendiri dan tidak boleh disamakan dengan istilah *homicide* yang merupakan pembunuhan tanpa mengenal gender. Baru-baru ini, gagasan tentang *femicide* telah banyak digunakan oleh para peneliti dalam disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan kriminologi. Ini juga telah masuk ke dalam dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan (Shepherd, 2019). Kekerasan terhadap perempuan ini masih menjadi masalah internasional yang dihadapi banyak

negara salah satunya Meksiko. Kekerasan terhadap perempuan di Meksiko merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan baik dari perspektif sosial maupun kebijakan. Ada dua jenis bentuk kekerasan *femicide* yang sering terjadi di Meksiko, pertama yaitu *Femicide Intimo* atau *Intimate Partner Violence*, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan/mantan pasangan/orang terdekat dari perempuan, kedua yaitu *Femicide Sexual Sistemico*, tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena meningkatnya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh aktivitas kartel narkoba (Mubarok, Eriyanti & Iqbal). Aktivis Amerika Latin menggunakan istilah ‘*Feminicidio*’ atau ‘*Feminicide*’ yang mereka bedakan dari pembunuhan berbasis gender yang lebih luas dengan peran negara dalam mengabaikan dan melakukan kekerasan terhadap warga negara wanita (Shackerlford, 2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan *femicide* sebagai ;

“ *femicide* umumnya diartikan sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap wanita karena mereka adalah wanita, namun definisi yang lebih luasnya mencakup pembunuhan wanita atau anak perempuan. Femicida dilakukan oleh laki-laki, terkadang anggota keluarga dari korban juga terlibat. Femicida berbeda dari *homicide*. Sebagian kasus dari Femicida dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, juga termasuk pelecehan dan kekerasan secara terus-menerus didalam rumah tangga, intimidasi atau ancaman”

Femicide Intimo atau *Intimate Partner Violence* merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan/mantan pasangan maupun orang

dekat yang diterima oleh perempuan salah satu jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang berkembang di Meksiko belakangan ini. Dari laporan WHO & PAN (2012) , temuan awal dari studi yang berlangsung oleh WHO dan *London School of Hygiene and Tropical Medicine* menunjukkan bahwa lebih dari 35% dari semua pembunuhan wanita di seluruh dunia dilaporkan dilakukan oleh pasangan. Sebagai perbandingan, studi yang sama memperkirakan bahwa hanya sekitar 5% dari semua pembunuhan pria yang dilakukan oleh pasangan intim. Di antara semua pembunuhan pria dan wanita, sekitar 15% dilaporkan dilakukan oleh pasangan intim. Angka-angka ini konservatif, mengingat tingginya jumlah data yang hilang, yang khususnya mengkhawatirkan di negara-negara nonindustri.

Pada tahun 2012 Meksiko baru memulai menghitung data dari korban *femicide* secara resmi, pada tahun yang sama pula Meksiko mempunyai insiden pembunuhan terbanyak ke-16 di dunia. Kelambanan dari pemerintah Meksiko mengundang kecaman dari seluruh dunia, Meksiko mempunyai isu pembunuhan terhadap wanita yang jauh dari sekedar isu lokal. Selama tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an pembunuhan wanita di Ciudad Juarez sudah mendapatkan perhatian baik nasional dan internasional dengan kasus ratusan wanita yang dilaporkan menghilang dan ditemukan tewas. Dalam 5 tahun terakhir kasus pembunuhan wanita di Meksiko meningkat dua kali lipat setidaknya ditemukan 10 wanita terbunuh setiap harinya di Meksiko. Lebih dari 40% korban *femicide* di Meksiko mengetahui pelaku pembunuhannya, femisida merupakan kejahatan brutal yang menargetkan wanita. Statistik dari

perlakuan yang diterima korban yaitu dengan cara dicekik, ditenggelamkan, ditikam dan cara-cara tidak manusiawi lainnya ini berdampak pada persepsi keamanan di Meksiko. Sekitar 77% wanita di Meksiko melaporkan merasa tidak aman, Meksiko kemudian dikenal dengan julukan negara yang berbahaya untuk menjadi wanita.

Menurut *Museo Memoria y Tolerancia Exposicion* (2017), hukum Meksiko menjelaskan bahwa kekerasan *Femicide* merupakan bila seorang wanita dibunuh karena jenis kelaminnya dan agar kejahatan tersebut terhitung juga dapat dituntut, setidaknya harus ada satu keadaan seperti korban menunjukkan tanda-tanda adanya kekerasan seksual, korban dilukai atau dimutilasi sebelum atau sesudah kehilangan nyawa atau nekrofilia, adanya riwayat segala jenis kekerasan dalam keluarga, ditempat kerja atau di sekolah, oleh orang yang bertindak melawan korban, telah ada hubungan cinta atau kepercayaan antara pembunuh dan korban, ada bukti ancaman oleh pelaku, korban kehilangan komunikasi, tubuh korban diekspos atau dipamerkan.

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan undang-undang yang mengatur hak asasi perempuan internasional yang diadopsi pada tahun 1979 oleh UN *General Assembly*. Konvensi ini mempunyai dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan adanya akses dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam semua bidang.

CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai;

"... setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, tanpa memandang status perkawinan mereka, pada dasar kesetaraan pria dan wanita, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya".

CEDAW merupakan konvensi pertama yang membahas Hak Asasi Manusia dengan menargetkan budaya dan tradisi sebagai kekuatan membentuk gender juga hubungan keluarga dan menegaskan hak reproduksi perempuan (UN Women, 2008). Menurut data dari dokumen CEDAW/C/GC/35 II No.16 , kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat berupa penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dalam keadaan tertentu, termasuk dalam kasus pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau praktik yang merugikan, antara lain. Dalam beberapa kasus, beberapa bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mungkin juga merupakan kejahatan internasional. Pada No 19 dijelaskan Komite menganggap kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berakar pada faktor-faktor terkait gender seperti ideologi hak dan hak istimewa laki-laki atas perempuan, norma-norma sosial mengenai maskulinitas, kebutuhan untuk menegaskan kontrol atau kekuasaan laki-laki, penegakan peran gender, atau mencegah, mencegah atau menghukum apa yang dianggap sebagai perilaku perempuan yang tidak dapat diterima. Faktor-faktor ini juga berkontribusi pada penerimaan sosial eksplisit

atau implisit atas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang seringkali masih dianggap sebagai masalah pribadi dan meluasnya impunitas karenanya (General CEDAW, 2017).

Meksiko telah meratifikasi Konvensi ini pada tanggal 23 Maret 1981 kemudian meratifikasi Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan bersamaan dengan Prosedur Penyelidikan Di Bawah Protokol Opsional pada Konvensi CEDAW pada 15 Maret 2002. Sesuai dengan UN Women CEDAW sebagai negara yang meratifikasi Konvensi ini Meksiko berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk, termasuk untuk memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum mereka, menghapus semua undang-undang yang diskriminatif dan mengadopsi undang-undang yang sesuai yang melarang diskriminasi terhadap perempuan; untuk membentuk pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dari diskriminasi; untuk memastikan penghapusan semua tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi, atau perusahaan.

Pada tahun 2003, *femicide* digolongkan sebagai kejahatan dalam KUHP Meksiko, secara konkret berdasarkan Pasal 325. Pasal ini menetapkan keadaan khusus di mana suatu kejahatan diklasifikasikan sebagai *femicide*. Ini termasuk: jika mayat menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual, mutilasi yang merendahkan, atau cedera jenazah diekspos ke ruang publik, korban memiliki catatan pernah mengalami kekerasan terkait keluarga, atau adanya

hubungan intim antara korban dan tersangka. Namun, bahkan setelah KUHP Meksiko menggolongkan *femicide* sebagai *Special Crime*, akan tetapi catatan peradilan menunjukkan persentase kecil dari *femicide* yang sebenarnya diperlakukan seperti itu. Mayoritas dari korban dimasukkan dalam kasus sebagai pembunuhan biasa lalu menghilangkan mereka dari kategori kejahatan seksual atau *femicide*. Terlihat di bidang legislatif serangkaian perubahan memang sudah dimulai baik amandemen undang-undang yang ada maupun penerapan undang-undang baru dengan mengakui masalah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dalam segala bentuknya dan di semua situasi di mana hal itu terjadi. Khususnya disahkannya Undang-Undang Umum untuk Akses Perempuan ke Kehidupan yang Bebas dari Violence (LGAMVLV) pada tahun 2007 (Oliva, n.d.).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus kepada hambatan Pemerintah Meksiko mengimplementasikan CEDAW dalam mengatasi kasus *Femicide Intimo* di Meksiko tahun 2015-2020. Karena pada tahun 2015 kasus *femicide intimo* di Meksiko kembali meningkat.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hambatan implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam penyelesaian kasus *Femicide Intimo* di Meksiko?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diajukan penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi Konvensi CEDAW dalam mengatasi kasus *Femicide Intimo* di Meksiko. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana Meksiko dalam mengimplementasikan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women (CEDAW)* yang mempunyai dasar Konvensi mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta undang-undang yang mengatur hak asasi perempuan Internasional.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis, penelitian ini dapat menjadi wacana dan kajian yang memperluas pengetahuan dalam disiplin Hubungan Internasional.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini menjadi salah satu alasan adanya penelitian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Meksiko maupun yang terjadi di Negara lain.
- c. Kegunaan Tambahan, sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana dalam program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh landasan dari penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang akan sangat berguna dalam menganalisa masalah, yaitu menggunakan konsep Impunitas yang merujuk pada konsep dari PBB dengan asumsi sebagai salah satu upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengurangi pelanggaran terhadap HAM. PBB membentuk pengadilan-pengadilan *ad hoc* serta pengadilan pidana internasional untuk mengakhiri impunitas secara permanen. PBB juga mengumpulkan prinsip-prinsip untuk memerangi impunitas serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia yang kemudian disebut dengan '*the Principles*'. Dikembangkan pada tahun 1990-an dan diperbarui pada tahun 2000-an, dokumen penting ini merupakan buah dari beberapa tahun studi yang awalnya dirancang oleh Louis Joinet dan diperbarui oleh Diane Orentlicher yang dilakukan dibawah naungan UN *Commission on Human Rights*. *The Principles* menjadi titik referensi yang mempunyai kuasa dalam upaya perjuangan internasional melawan impunitas. *The Principles* muncul bersamaan dengan dokumen penting PBB lainnya yang didedikasikan untuk sebagai kewajiban negara dan hak-hak korban salah satunya *Serious Violations of International Humanitarian Law dan the Basic Principles on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law* (UN Doc, 2006). Pengertian dari impunitas masih menjadi diskusi hingga saat ini, banyak diskusi menjelaskan '*impunity*' sebagai tidak adanya peradilan pidana. *The Principles* mendefinisikan impunitas secara lebih luas yaitu 'kemustahilan, *de jure* atau

de facto, untuk membawa para pelaku pelanggaran ke pertanggungjawaban'. Sebagaimana dinyatakan secara jelas di dalam *Principle 1*, impunitas muncul dari kegagalan negara untuk memenuhi tiga kewajiban hukum hak asasi manusia internasional yaitu:

- 1 Menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran tersebut. Menegakkan hukum ketentuan tentang kasus dengan bantuan penegak hukum, meminta kesaksian, memeriksa tempat yang bersangkutan dengan penyelidikan.
- 2 Mengidentifikasi korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Menetapkan prosedur yang menjamin anonimitas korban serta membuktikan informasi yang diberikan, korban mempunyai hak dalam mengakses keadilan serta menerima penghormatan terhadap martabat. Negara harus memberikan tindakan yang tepat untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan fisik dan privasi dan mempertimbangkan perawatan khusus untuk menghindari trauma yang mungkin.
- 3 Memberikan pemulihan secara efektif bagi para korban dan memastikan bahwa mereka menerima bantuan atas kerugian yang dialami, seperti perluasan dana nasional untuk kompensasi kepada para korban harus didorong dan mempercepat pengembangan hak-hak dan pemulihan bagi korban.

Impunitas menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya pengulangan kejahatan terhadap perempuan terutama dalam kasus *femicide*

intimo, impunitas muncul sebagai penyebab dan akibat dari kejahatan hak asasi manusia di Meksiko. Dengan memberikan akses tidak ada hukum yang menjerat para pelaku kriminalisasi akan memicu ketakutan di masyarakat, dimana perlindungan yang satu-satunya dapat mereka miliki adalah keadilan dari pemerintah dimana pelaku akan bertanggungjawab (OHCHR, 2017).

Impunitas dalam konteks HAM mengurangi atau menghambat proses pemulihan bagi para korban. Pendekatan dalam sisi impunitas memusatkan kepada para korban yang sangat subjektif dan pribadi: korban bersebelahan dengan pelaku namun merasa tidak mempunyai kekuatan. Impunitas mempunyai dimensi normatif dan faktual. Penekanan kepada timbal balik hukum impunitas nasional dengan praktik hukum pidana internasional serta konsep tatanan negara diperiksa dengan latar belakang kewajiban hukum pidana internasional. Tindak pidana pelanggaran HAM melanggar keutuhan dan membatasi hak pribadi, pemberian hukum kemudian menjadi penting. Ini mencerminkan situasi internasional serta menjelaskan mekanisme yang dibentuk oleh PBB dalam mengontrol kejahatan jenis pelanggaran ini (Ambos & Freiburg, 1997).

Tingkat kasus *femicide intimo* yang meningkat selama beberapa tahun terakhir mengundang banyak protes dari nasional dan internasional, penciptaan strategi Meksiko selama ini dalam memerangi *femicide* sepertinya tidak berjalan secara efektif karena situasi yang tidak membaik serta berdampak kepada perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Mayoritas kasus *femicide* di Meksiko tidak dihukum karena terbatasnya akses dan keadilan terhadap perempuan (Gonzalez, 2020).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif analitis, penulis mencoba mencari sebab dan menggambarkan sehingga terjadi suatu fenomena yang diteliti pada penelitian ini yaitu terkait dengan implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* dalam mengatasi *Femicide Intimo* di Meksiko

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis akan menggunakan data sekunder pada penelitian ini yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, melalui buku teks maupun elektronik, jurnal, skripsi, media massa, situs resmi organisasi dan pemerintah, juga sumber-sumber lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik telaah pustaka dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dengan studi dari literatur seperti buku teks atau elektronik, jurnal, artikel berita, skripsi, website serta penelitian yang berhubungan dengan variabel penelitian ini yang didapatkan melalui internet atau perpustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu data akan ditekankan pada bahasan konseptual dari suatu fenomena dan bersifat non-numerik. Analisa menggunakan segala data yang didapatkan dari telaah pustaka.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab I akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian, dan rancangan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab II akan lebih membahas definisi yang lebih detail sehubungan dengan teori atau konsep yang digunakan penulis pada penelitian ini.

BAB III : Gambaran Umum

Bab III akan membahas tentang gambaran umum dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* dan *femicide intimo* di Meksiko.

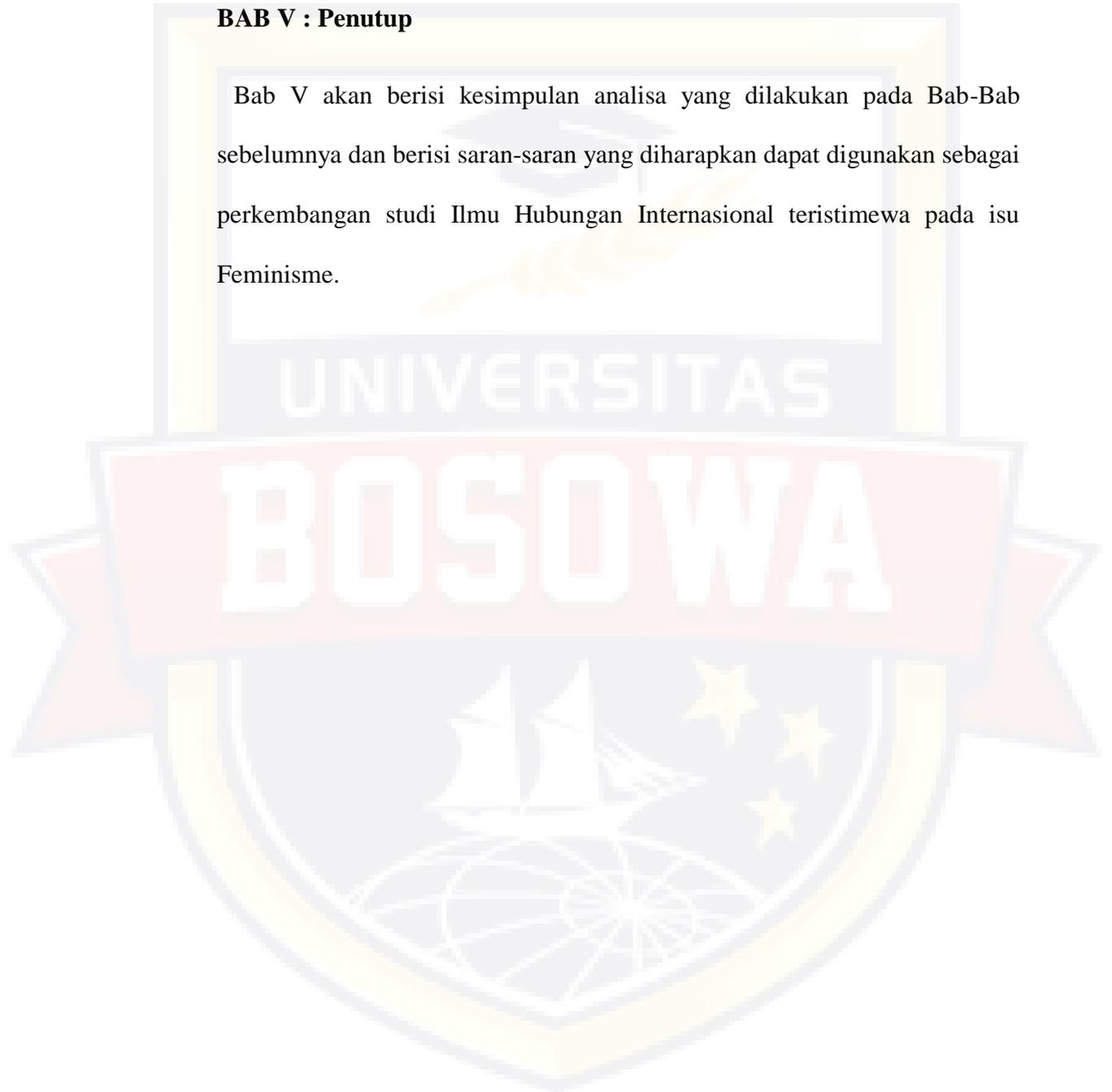
BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini, akan berisi pemaparan berbagai temuan yang telah dianalisis dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah serta membuktikan benar atau tidaknya hipotesa yang telah dirumuskan diawal oleh penulis bahwa ada hambatan implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*

dalam mengatasi *femicide intimo* di Meksiko serta tindakan yang telah dilakukan oleh Komite Konvensi dan Pemerintah Meksiko.

BAB V : Penutup

Bab V akan berisi kesimpulan analisa yang dilakukan pada Bab-Bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional teristimewa pada isu Feminisme.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Impunitas

Impunitas dapat didefinisikan sebagai kejahatan tanpa hukuman, tidak ada sanksi pembalasan hukum kepada pelaku kejahatan ketika melakukan kejahatan. Le Clercq menguraikan impunitas kedalam konsep yang berbeda, yaitu *thick impunity* dan *thin impunity* tergantung tingkat impunitas yang terjadi. *Thin impunity* akan berfokus kepada keadilan hukuman atau keputusan atas kejahatan yang dilakukan, *thick impunity* mempunyai konsep definisi yang sama dengan *United Nation Human Rights Council 2005* yang diperbarui oleh Diane Orentlicher yaitu ketidakmungkinan secara '*de jure*' dan '*de facto*' untuk membawa pelaku ke pengadilan, mencakup hubungan antara hukum dan masyarakat serta meliputi disfungsi kelembagaan tidak hanya aspek struktural juga pada aspek fungsional lembaga (Le Clercq, 2019).

Menurut UN *Secretary-General* impunitas merupakan tindakan yang akan menambah efek kepada *femicide*. Ketika suatu negara gagal untuk meminta pertanggungjawaban pelaku secara tidak langsung mengirimkan pesan kepada masyarakatnya bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan tidak dapat dihindari dan dapat diterima (OHCHR, 2012).

Definisi impunitas dari Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNCHR) di dalam laporan *Orentlicher*:

[...] [impunity means] the impossibility, de jure or de facto, of bringing the perpetrators of violations to account—whether in criminal, civil, administrative, or disciplinary proceedings—since they are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried, and, if found guilty, sentenced to appropriate penalties, and to making reparations to their victims (CDHIO, 2005).

Impunitas '*de jure*' diartikan adanya undang-undang dan kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan, untuk mengganti kerugian dan menjatuhkan sanksi. Impunitas '*de facto*' akan melibatkan fungsi lembaga-lembaga peradilan Negara dalam memastikan bahwa pelaku akan dihukum dan korban akan menerima pemulihan atau kompensasi (IGI, 2020). Impunitas di Meksiko mempersulit jaminan respon yang lebih efektif terhadap kasus kekerasan terhadap gender, mematikan fungsi negara dan hukum, memicu ketakutan di kalangan masyarakat, manipulasi kekuasaan hukuman yang disengaja oleh Negara dan non-Negara, menghambat perlindungan dan promosi hak asasi manusia.

Salah satu dasar dari hukum suatu negara adalah hak atas perlindungan hukum. Undang-undang serta kebijakan di suatu negara mempunyai pengaruh yang utama dalam mempercepat, menghambat, serta mengubah masyarakatnya dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi, sehingga dalam hal kesetaraan gender pada aktivis serta orang-orang yang peduli akan kesetaraan gender akan mengalihkan pandangan mereka seluruhnya kepada negara (Brinks, 2008). Sistem peradilan akan berfungsi dalam membentuk klasifikasi kasus kekerasan berdasarkan gender serta klasifikasi sebelum dan sesudah kasus terjadi. Ketika sistem peradilan tersebut tidak berfungsi, korban dan keluarga korban akan sulit dalam mendapatkan keadilan. Ini akan

mengakibatkan keruntuhan aturan hukum yang ber-gender dan terklasifikasi sehingga korban dan keluarga dari kasus kekerasan ini sulit diproses melalui peradilan (Walsh & Menjivar, 2016).

2. Impunitas dan *Femicide Intimo*

Konsep impunitas menjelaskan mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menyelidiki, melaporkan, serta menyampaikan kasus namun akibat kurang efektif dijalankan sehingga menyebabkan pelanggaran ini tetap berlanjut. Menurut *UN Document* 1991, impunitas muncul pertama kalinya dalam agenda *UN Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* di Geneva pada tahun 1991. Beberapa organisasi non-pemerintah (NGOs) mengangkat masalah ini selama sesi ke-43, dengan menyoroti bagaimana impunitas menghambat perlindungan hak asasi manusia serta menghancurkan supremasi hukum dalam masyarakat. Masyarakat sipil dan para ahli hak asasi manusia memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk agenda anti-impunitas PBB Sepanjang tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an Sistem Hak Asasi Manusia PBB mengembangkan *the Principles*. Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*the Commission*), terutama Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (*the Sub-Commission*) memiliki peran penting dalam proses ini. Louis Joinet dan El Hadji Guisse anggota dari *the Sub-Commission* diminta untuk menyusun paper tentang pendekatan yang diambil dari studi tentang impunitas yang kemudian diperbarui oleh Diane Orentlicher. Pada tahun 1992, makalah

tersebut diserahkan kepada Sub-Commission (Haldemann, Unger & Cadelo, 2018).

The Principles terikat kuat dengan gagasan tentang hak, sebuah gagasan yang berarti bahwa dalam masyarakat modern yang kompleks, mengumpamakan ada sistem hukum yang membuat hak-hak individu diakui secara keseluruhan serta diterjemahkan ke dalam realitas sosial (UN, 2004). *The Principles* diartikulasikan sebagai standar hukum yang menjadi perhatian internasional dan diterapkan melintasi batas negara sehingga berhubungan dengan hukum internasional. *The Principles* berfungsi sebagai kerangka tumpuan yang penting untuk kebijakan dan kelembagaan untuk menjadi bagian integral dari wacana hukum internasional kontemporer yaitu '*a subtle and evolving interplay of law-making instruments, both binding and non-binding*' (Boyle & Chinkin, nd.). *The Principles* menyusun kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional juga merujuk kepada perkembangan terkini serta prinsip-prinsip yang berasal dari hukum internasional (UN, 2004). *The Principles* merupakan titik referensi yang mempunyai kuasa dalam upaya perjuangan internasional melawan impunitas.

Menurut *Principles* 1, impunitas merupakan kegagalan negara untuk memenuhi 3 kewajiban dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu:

- a. Menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran tersebut.

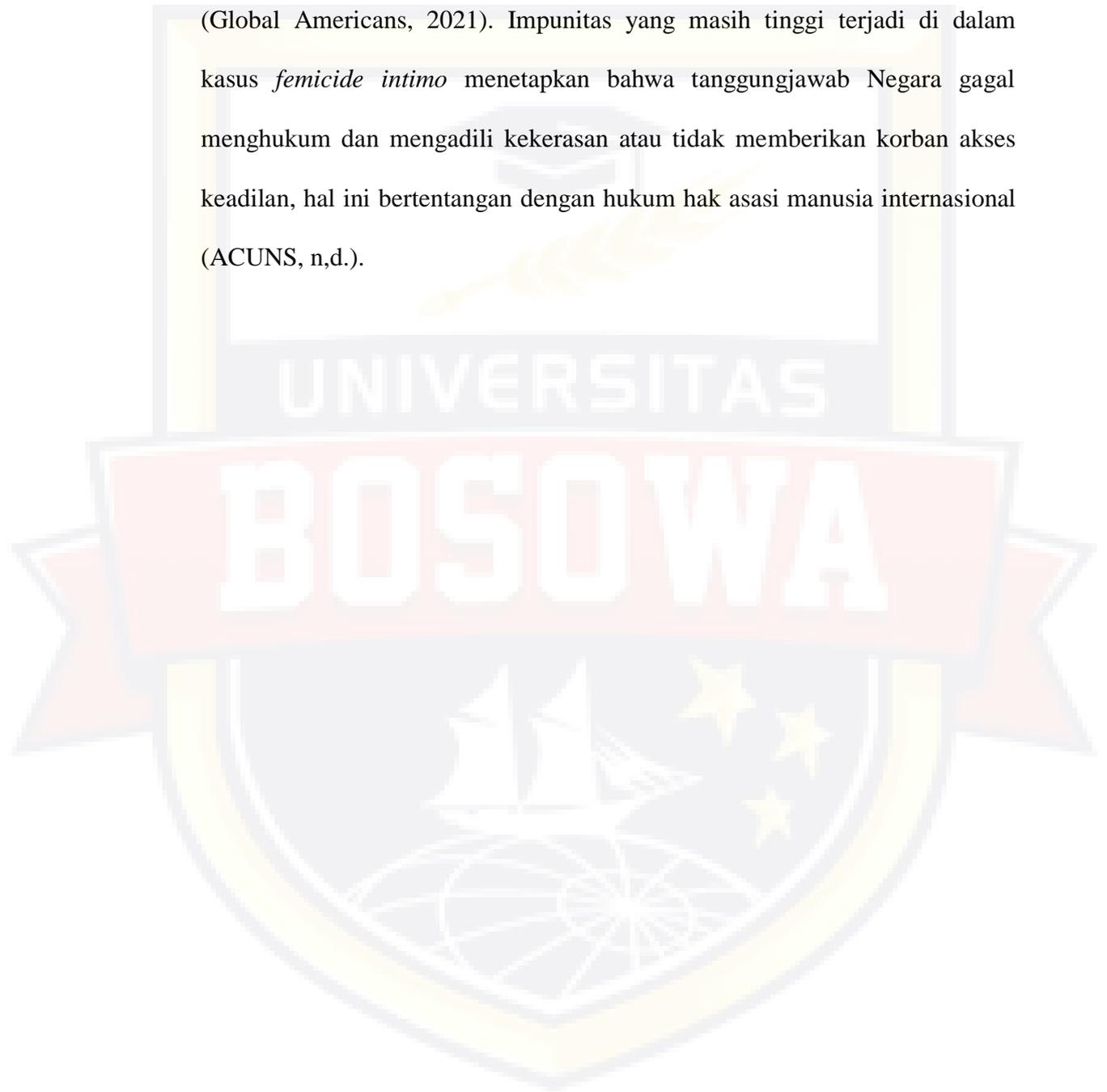
- b. Mengidentifikasi korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia;
- c. Memberikan pemulihan yang efektif bagi para korban dan memastikan bahwa mereka menerima bantuan atas kerugian yang dialami; dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Asumsi yang diberikan *the Principles* adalah jika hak asasi manusia penting, mereka harus secara aktif diamankan serta dihormati.

Impunitas dan kurangnya pemulihan hukum terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan titik awal dari kecaman terhadap *femicide intimo* oleh para aktivis hak-hak perempuan serta korban (Toledo, 2013). *Femicide intimo* merupakan kekerasan yang tidak dapat ditolerir dan melanggar jaminan paling dasar hak untuk hidup. *Femicide intimo* memunculkan analisis kritis terhadap fungsi sistem peradilan, meningkatkan kesadaran publik, dan menginformasikan pengembangan terhadap kebijakan pencegahan. Kekerasan ini mempunyai hubungan tertentu dengan faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hukum menjadi cerminan masyarakat serta sarana transformasi. Pengakuan tentang hak asasi perempuan di dalam hukum akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap gender tidak akan ditoleransi (Gibbon, Walklate, McCulloch & Maher, 2018).

Impunitas mengikis fungsi negara dan hukum dalam melindungi masyarakatnya, bertentangan dengan hak asasi manusia serta menghadirkan konflik atau perbedaan yang sangat besar dalam informasi statistik negara

dalam melaporkan suatu masalah, baik kurangnya kapasitas negara dalam menghasilkan data atau kurangnya kemauan politik dalam melaporkan kasus (Global Americans, 2021). Impunitas yang masih tinggi terjadi di dalam kasus *femicide intimo* menetapkan bahwa tanggungjawab Negara gagal menghukum dan mengadili kekerasan atau tidak memberikan korban akses keadilan, hal ini bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional (ACUNS, n.d.).



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. *Femicide Intimo*

Istilah "*Femicide*" pertama kali diperkenalkan oleh Diana Russel di Pengadilan Internasional tentang Kejahatan terhadap perempuan di Brussel di tahun 1970. Kemudian, Russel mengadaptasi pengertiannya pada tahun 2001 menjadi "pembunuhan terhadap perempuan karena mereka perempuan". Kemudian, peradilan pidana menggunakan istilah "*Femicidio/Feminicidio*" dengan arti kejahatan yang berhubungan dengan gender lalu menyebar ke seluruh dunia sejak dekade terakhir abad XXI dengan bahasa spanyol, setelah peristiwa mengerikan terjadi di Meksiko menarik mata internasional. Sidang tentang *femicide (killing of women)* menjadi rujukan pertama tentang *femicide* dalam dokumen resmi Uni Eropa di Meksiko dan Guatemala di Parlemen Eropa pada April 2006 (Londoño & González, 2020). *Femicide intimo* merupakan fenomena yang kompleks, dimana terjadi ketidakjelasan penerapan perspektif tentang gender, proses dalam menggolongkan kejahatan, model institusional yang kompleks dengan hambatan hukum, ideologis dan budaya.

Kekerasan terhadap gender atau *femicide* merupakan fenomena sosial yang berukuran ganda juga beragam. Dari perspektif HAM kasus ini adalah perpecahan dengan klasifikasi standar, prinsip, hak, pedoman, dan kebebasan yang besar berdasarkan hukum internasional. *Femicide* mempunyai definisi yang bervariasi sesuai dengan transformasi fenomenanya sendiri, dan diantara

berbagai aktivis, pembela hak-hak perempuan, dan akademisi. Di Amerika Latin, *femicide* didefinisikan dengan cara yang berbeda seperti "*the misogynist killing of women by men*", "*the mass killing of women committed by men based on their group superiority*", atau "*the extreme form of gender-based violence*". Adanya sistem patriarki yang luas dalam menindas perempuan ditandai dengan definisi-definisi ini (UN Women, OHCHR & UNITE). Beberapa aktivis feminis Meksiko seperti Marcela Lagarde dan Julia Monárrez mendefinisikan *femicide* sebagai tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan dimana tanggapan pihak berwenang dinilai lalai, diam, dan gagal dalam bertindak memberantas kejahatan ini termasuk semua kebijakan yang ditoleransi oleh negara yang menyebabkan kematian perempuan.

Femicide memanifestasikan bentuk pembunuhan berbasis gender dan bentuk-bentuk kejam dan ekstrim dari kekerasan terhadap perempuan yang ada, diantaranya yaitu: *intimate femicide* yaitu pembunuhan perempuan oleh pasangan atau orang terdekat, pembunuhan terhadap perempuan yang juga digunakan sebagai alat dalam kartel narkoba atau *systemic sexual femicide* (Acuns, 2015). *Intimate partner violence* (IPV) atau *intimate femicide* jenis *femicide* yang paling sering terjadi di Meksiko merupakan kekerasan berbasis gender dengan bentuk pelecehan yang agresif secara fisik, seksual, dan emosi oleh pasangan yang sangat umum korban adalah perempuan (WHO, 2012).

Femicide merupakan masalah global, namun tingkat kejahatan kekerasan terhadap perempuan di negara-negara di Amerika Latin memiliki jumlah

kasus yang lebih tinggi terutama di Meksiko. Di Meksiko hampir 74% korban di Meksiko melaporkan telah diserang atau dilecehkan dengan kekerasan oleh pasangan mereka sendiri (Sterling, 2018). Jumlah ini bahkan masih lebih mengkhawatirkan ketika mempertimbangkan pelanggaran atau serangan yang tidak dilaporkan.

Situasi-situasi kekerasan terhadap perempuan menghadirkan karakteristik yang cenderung sama dengan didasarkan "budaya kekerasan dan diskriminasi" dan mempunyai "akar dalam konsep subordinasi perempuan dan inferioritas". Kasus ini mewakili fenomena dan struktural sosial dan budaya yang berakar dalam adat dan pikiran (UN Women, OHCHR & UNITE, n.d.). Penggunaan istilah *femicide* dibanding dengan *homicide* sangat penting karena *homicide* tidak membedakan korban dari suatu kejahatan kekerasan serta tidak memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap dinamika kekerasan terhadap perempuan. *Femicide* menyoroti kekerasan berbasis gender melalui kosa kata yang akan sangat penting dalam diskusi seputar kekerasan perempuan dengan menekankan peran gender terhadap kejahatan kekerasan (Sterling, 2018).

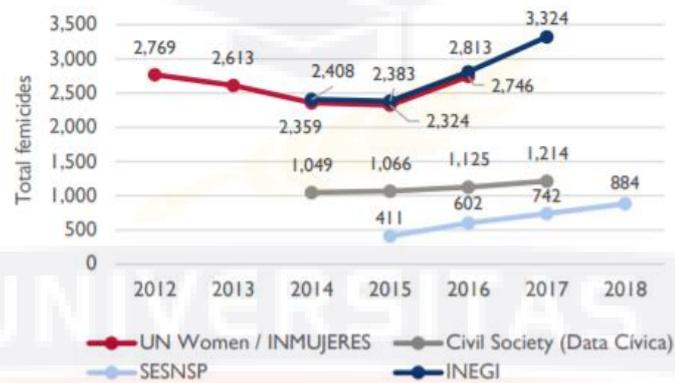
Femicide lebih dari kekerasan secara langsung, namun ekspresi kekerasan struktural yang dibenarkan oleh kekerasan simbolik oleh masyarakat, pengabaian pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang adalah korban oleh komunitas tidak sedikit yang bahkan menyalahkan mereka, negara yang tidak dapat mengambil tindakan yang tegas dalam administrasi peradilan, administrasi publik, dan menjamin hak-hak perempuan di negaranya, dan

mengekalkan diskriminasi melalui kelalaian, pengabaian, kebisuan, membantah kebenaran oleh otoritas yang seharusnya bertanggung jawab dalam mencegah dan memerangi kejahatan ini (UN Women, OHCHR & UNITE, n.d.).

Meskipun perwujudan yang menunjukkan keterkaitan yang berbeda antara norma dan praktik sosial budaya, *femicide* merupakan fenomena internasional yang telah mencapai skala yang mengkhawatirkan. Perempuan dalam berbagai tahap perkembangan, situasi dan kondisi adalah korbannya. Laporan-laporan yang tersedia mengungkapkan *femicide* menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang ada sebelum, selama, atau setelah tindak kejahatan. Dalam sebagian besar kasus pembunuhan merupakan tindakan terakhir dari rangkaian kekerasan, terutama dalam kasus *intimate femicide*. Beberapa poin ini menjadi pembeda *femicide* dengan kasus pembunuhan lainnya (UN Women, OHCHR & UNITE, n.d.).

Menurut PBB, 14 dari 25 negara dengan tingkat pembunuhan wanita tertinggi berada di Amerika Latin dan Karibia. Data dari Sekretariat Eksekutif Sistem Keamanan Publik Nasional Meksiko, kejahatan *femicide* antara tahun 2015-2017 ada 1.640 kasus yang di investigasi. Jumlah kasus terdaftar meningkat di tahun 2017 sebesar 72%, hampir dua kasus *femicide* setiap harinya di Meksiko. Diperkirakan 60.000 wanita setiap tahun di wilayah tersebut terbunuh. Sekretaris Jenderal Keamanan Publik Nasional Meksiko, melaporkan bahwa antara tahun 2015-2019 kasus *femicide* meningkat dari 411 menjadi 983, menunjukkan sekitar 139%. Pada bulan Januari tahun 2019

terdapat 10 kasus per hari. Menurut data analisis dari *InSight Crime* yang diperoleh dari *National Map of femicide* di Meksiko, pada awal pandemi COVID-19 antara 16 Maret 2020 - 30 April 2020 tercatat ada 405 kasus femicide.



Gambar 1. Source: SESNSP, INEGI, UN Women and INMUJERES, Data Cívica



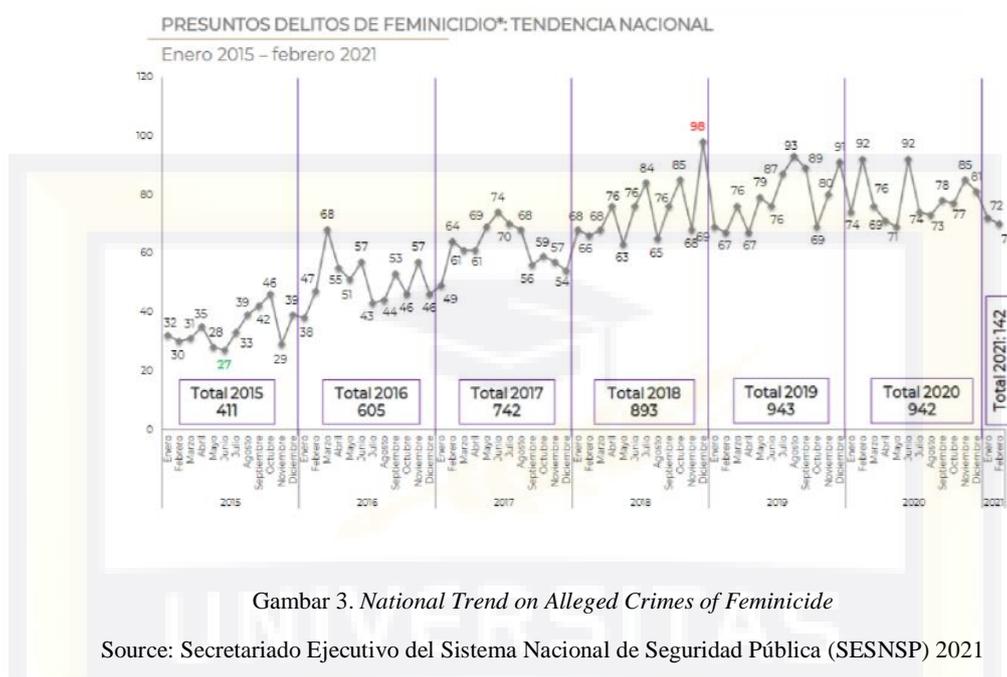
Gambar 2. source: Justice in Mexico, 2019

Meksiko menonjol sebagai salah satu dari 5 negara di dunia dengan peningkatan tertinggi dalam kasus *femicide* antara tahun 2011-2014.

Kemudian, pada tahun 2019 Meksiko menempati urutan pertama dalam kasus femicide di 24 negara di Amerika Latin menurut *the United Nations Office for the Prevention of Crime and Drugs*. Meksiko kemudian dikenal dengan julukan negara yang berbahaya untuk menjadi wanita.

Menurut Survei Nasional 2016, oleh *Instituto Nacional de Estadística y Geografía* (INEGI) atau Institut Nasional untuk Statistik dan Geografi Meksiko, dari 142,363 *intimate relationship* tentang berbagai jenis kekerasan yang dialami perempuan berusia 15 tahun keatas, 43,9% responden mengalami *intimate partner violence* dengan hubungan saat ini maupun sebelumnya. Dengan sumber yang sama tercatat respon dari korban, 78,6% "*because it was something unimportant that didn't affect them*", 28,8% "*for fear of the consequences*", 17,3% "*for shame*", 14,8% "*didn't know how and where to denounce the violent act*".

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) atau Eksekutif Sistem Keamanan Publik Nasional di Meksiko melaporkan laporan bulanannya (gambar 3) tentang *femicide* dan panggilan darurat 911 yang menunjukkan 942 kasus *femicide* selama tahun 2020, dan terdapat 142 kasus di Januari - Februari 2021 *femicide* yang terdaftar di seluruh dunia. Proses menangani dan menerima informasi oleh pemerintah Meksiko seringkali memperumit proses pengumpulan data, proses pencegahannya dan tingkat kasus *femicide* (Armenta, 2021).



Gambar 3. National Trend on Alleged Crimes of Femicide

Source: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 2021

Negara-negara dengan tingkat *femicide* yang tinggi, seperti Meksiko dalam hal pengumpulan data resmi dibatasi oleh pelaporan yang kurang, komplikasi dalam definisi hukum negara bagian tentang *femicide* karena setiap bagian negara mempunyai KUHP Negara Bagian yang unik dimana mungkin atau mungkin tidak selaras dengan KUHP Federal Pusat di Meksiko. Jenis perilaku yang memenuhi syarat sebagai *femicide* di Meksiko juga mengakibatkan kurangnya laporan dan perbedaan yang ada di pencatatan jenis kekerasan ini. Misalnya, jika 9.581 perempuan menjadi korban *femicide* di Meksiko antara tahun 2012 - 2016 maka akan hanya ada 1.887 kasus yang dikategorikan sebagai *femicide* atau 19,7% meskipun ada bukti yang memenuhi syarat. Seiring waktu, jumlah dari kasus *femicide* mempunyai kemungkinan totalnya jauh lebih tinggi daripada yang tercatat (Armenta, 2021).

B. Upaya Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi CEDAW

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW) diadopsi oleh United Nations pada tahun 1979, karena permasalahan diskriminasi yang luas terhadap perempuan. CEDAW mengakui pengalaman diskriminasi perempuan sebagai perempuan dan mengharuskan negara-negara pihak yang meratifikasi konvensi ini untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan untuk mencapai kesetaraan gender yang substantif (CEDAW, 2004). Meksiko meratifikasi *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tanggal 23 Maret 1981, kemudian pada tanggal 15 Maret 2002 meratifikasi *Optional Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* bersamaan dengan *Investigation Procedures Under the Optional Protocol on Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.

Pada tanggal 1 Februari 2007 pemerintah Meksiko menerbitkan Undang-Undang *La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* merespon femicide yang mengatur segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan landasan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Federal dalam mencegah *femicide*. Di dukung oleh berbagai program kampanye gender untuk mengubah pemikiran yang selama ini berkembang di masyarakat tentang tindak kekerasan dan pelecehan terhadap martabat perempuan.

Kebijakan berikutnya disahkan pada tanggal 14 Juni 2012 menetapkan tindakan *femicide* sebagai tindakan kriminal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federal Pasal 325 yang mengatur tentang tujuh protokol dalam menetapkan kasus femicide dan penetapan sanksi bagi pelaku. Sanksi juga akan berlaku bagi administrasi peradilan dan pegawai negeri yang menghalangi atau menunda sebuah penyelidikan (Mubarok, Eriyanti & Iqbal, 2021). Dibawah Sistem Nasional ini, "personil peradilan telah diberikan kursus pelatihan tentang hak-hak perempuan dan pengarusutamaan gender" (Meksiko, 2016). Menurut situs web INMUJERES di *Mexico City*, lembaga menyediakan layanan gratis bagi perempuan, termasuk konseling psikologis dan hukum dengan 16 Unit Bantuan Perempuan.

BAB IV

HAMBATAN IMPLEMENTASI CEDAW DALAM PENYELESAIAN

KASUS *FEMICIDE INTIMO* DI MEKSIKO

Setelah melakukan analisis data pada Bab sebelumnya tentang *Femicide Intimo*, Bab ini akan memberikan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah terkait Bagaimana implementasi ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) terhadap kasus *Femicide Intimo* yang terjadi di Meksiko. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menggunakan konsep Impunitas berdasarkan indikator yang dapat dilihat pada poin berikut:

1. Lambatnya Upaya Investigasi, Mengadili dan Menghukum Pelaku *Femicide Intimo*

Sebagai anggota PBB, Meksiko tunduk pada pengawasan badan hak asasi manusia PBB dan sebagai pihak dalam perjanjian hak asasi manusia tertentu, praktik dan kebijakan Meksiko dipantau oleh UN *Treaty Bodies*. Meksiko meratifikasi prosedur pengaduan dari 6 badan perjanjian salah satunya adalah *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Tinjauan terakhir CEDAW atas kedisiplinan Meksiko terhadap Konvensi pada tahun 2018 Artikel 2, Komite merekomendasikan agar Meksiko "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa klasifikasi *femicide* didasarkan kepada unsur-unsur objektif agar memungkinkan kualifikasi yang tepat dalam

hukum pidana lokal, mempercepat proses pendataan kasus dalam KUHP daerah yang tertunda, menyamakan protokol investigasi terhadap *femicide* di seluruh negeri, dan segera menginformasikan kepada keluarga korban..." (OHCHR, 2018).

Dalam laporan Komite PBB CEDAW berskala tahun 2018 tentang Meksiko, hambatan struktural, kebiasaan dan praktis, termasuk aparat penegak hukum yang memiliki sistem peradilan pidana yang mendiskriminasi gender serta pengetahuan yang terbatas tentang hak-hak perempuan terus menghambat akses keadilan perempuan (UN, 2018). *The Researcher* mencatat bahwa jika seseorang mengajukan pengaduan tentang kasus *femicide intimo* kepada pihak berwenang, tindakan yang dilakukan adalah mengeluarkan surat amanat yang berisi bahwa pelaku tidak dapat melakukan komunikasi dalam bentuk apapun kepada pengadu. Selanjutnya korban diminta untuk menyerahkan salinan fisik surat perintah tersebut kepada pelaku. Dalam satu kasus tentang salah satu siswa di Cuernavaca Meksiko, yang meminta bantuan setelah mengalami *intimate partner violence* dari mantan pasangannya (The Researcher, 2021).

Setelah mengantarkan surat penahanan kepada pelaku, siswa ini pulang dan menemukan bahwa pelaku masuk ke dalam rumahnya lalu mencoba menghubungi polisi namun tidak ada tanggapan selama 4 jam. *The Researcher* juga mencatat bahwa meski beberapa korban berhasil memberikan perintah penahanan atau pihak berwenang yang melakukannya, bagi para pelaku surat tersebut tidak ada artinya sekaligus mandat yang tertera

karena mereka yakin pihak berwenang tidak akan menahannya (The Researcher, 2021).

Kasus seperti ini sering terjadi di Meksiko, sehingga beberapa dari korban atau keluarga korban dari *femicide intimo* memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami, mengetahui bahwa tindakan dari pihak berwenang tidak dapat memberikan apa yang mereka cari, bahkan menambah ketakutan kalau-kalau pelaku kekerasan membalaskan dendamnya atau amarahnya. Sistem peradilan pidana seringkali merasa bahwa masalah *femicide intimo* dapat diselesaikan secara kekeluargaan, atau bahkan tidak sedikit kasus dimana perempuan menjadi pihak yang bersalah dalam kekerasan atau kematiannya sendiri. Kebiasaan dari penegak hukum yang kurang peduli terhadap kasus ini secara tidak langsung memberikan persetujuan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu normal, surat yang berisi mandat pun kemudian dilihat oleh pelaku sebagai kertas bertuliskan peringatan namun tidak mempunyai arti lebih. Dalam hal ini, menurut data resmi dari *Justice Procuration Offices and State Prosecution Offices* kepada *National Citizen Observatory of Femicide* (OCNF) hanya antara tahun 2014-2017, terdapat kurang lebih 6.297 wanita menjadi korban pembunuhan di Meksiko, namun, hanya sekitar 30% dari kasus yang diselidiki dibawah *The Performance Protocol for the Investigations of cases of Femicide* atau Protoko Kinerja untuk Investigasi Kasus *Femicide* di Meksiko (UN-CEDAW, 2018).

Tingkat kasus *femicide intimo* periode Januari-Juni 2020 meningkat 7,7% dari tahun 2019 (Urrutia & Jiménez, 2020). Covid-19 menjadi puncak dari tingkat kasus di Meksiko. Bagi sebagian orang rumah menjadi tempat yang aman untuk berlindung, sebaliknya yang dirasakan oleh sebagian besar perempuan di Meksiko rumah menjadi tempat dimana mereka mempertaruhkan hidup dan mati, mereka menyadari bahwa mereka tidak aman dan tidak dapat mempercayai pihak berwenang. Isolasi dan karantina dirumah menjadi masalah yang mengkhawatirkan keselamatan perempuan. Hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengejar keadilan atas kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan terhadap mereka merupakan pelanggaran langsung terhadap CEDAW Pasal 15 bahwa Negara Pihak harus memberikan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di depan hukum. Kegagalan penyelidikan, penghukuman, penuntutan oleh pihak berwenang di Meksiko tidak hanya melanggengkan *femicide intimo*, tetapi juga mewujudkan pelanggaran tambahan terhadap hak-hak perempuan serta melindungi pelaku dari tanggungjawab.

Negara-negara dengan institusi *rule of law* yang lemah salah satunya Meksiko, kartel narkoba dapat mengancam negara atau pihak yang berwenang secara politik dengan suap yang biasa dilakukan oleh organisasi agar diberi jalan. Masalah ini akan tetap berlanjut ketika terjadi keberhasilan dalam transaksinya yang kemudian mengarah kepada disfungsi institusional dan korupsi baik ditingkat lokal maupun nasional. Ketika ekonomi gelap berkembang, penegakan hukum dan proses peradilan otomatis akan

berkurang. Impunitas untuk kegiatan kriminal juga meningkat, merusak pencegahan dan kredibilitas peradilan (UN Chronicle, n.d.). Kejahatan *femicide* oleh kartel narkoba terjadi di daerah-daerah dimana terdapat "budaya geng", dimana perempuan dianggap "*disposable*", serta dapat digunakan sebagai bandar narkoba atau pengedar narkoba (World Vision Canada, 2020). "*Disposable*" disini diartikan bahwa jika suatu kartel narkoba tertangkap yang akan diserahkan adalah perempuan yang dianggap sebagai pengedar atau perempuan disamakan dengan "barang sekali pakai" sehingga tidak akan merugikan organisasi. Seorang doktor dari kriminologi di Universitas Toronto bidang dinamika kelompok kartel narkoba di Meksiko menjelaskan bahwa budaya kartel narkoba atau "*underworld*" sangat patriarkal, dan pasangan dari anggota kartel narkoba sering dicap 'kepemilikan' sehingga perempuan tidak dapat meninggalkan hubungan kapanpun ataupun merasa bebas (Doctor of criminology, 2021). Tidak sedikit dari korban *intimate femicide* di Meksiko dibunuh oleh anggota kartel narkoba. Menurut data analisis *Insight Crime* yang diperoleh dari awal pandemi Covid-19 antara 16 Maret 2020 - 30 April 2020, 63% di antaranya terkait dengan kartel narkoba. Korban paling sering adalah wanita yang mempunyai status ekonomi rendah, *prostitutes*, pekerja maquila, atau anggota geng. Meski bertanggungjawab atas sejumlah kasus *intimate femicide*, pihak berwenang lebih memihak kepada mereka dikenyataan yang sebenarnya.

Kekerasan terhadap perempuan yang dinormalisasi menjangkau setiap lapisan masyarakat (García & Villanueva 2020) termasuk jurnalis dan pers.

Dalam indeks Impunitas Global yang diterbitkan oleh *Committee to Protect Journalists* (CPJ), secara global Meksiko menempati peringkat diantara 10 negara dengan jumlah kasus tertinggi dalam impunitas serta kasus yang tidak terpecahkan hingga kini kepada para pelaku kejahatan terhadap jurnalis (CPJ, 2017). Selama satu dekade terakhir di Meksiko, setidaknya terdapat 74 jurnalis yang terbunuh dan banyak diantaranya menerima ancaman atau intimidasi. Jumlahnya meningkat dari tahun 2017, terdapat 22 pembunuhan jurnalis yang dilaporkan oleh Pelapor Khusus IACHR untuk Kebebasan Berekspresi di Meksiko.

Meningkatnya kasus terhadap para jurnalis akan berdampak kepada penyebaran informasi kepada masyarakat, kebebasan berekspresi dan akuntabilitas pemerintah dipertanyakan. Pemerintah Meksiko bahkan dilaporkan memberikan sogokan kepada media dengan kontrak iklan yang menarik atau dengan cara mengintimidasi dan penghukuman kepada media yang mengkritiknya. Pemerintah di Meksiko dilaporkan akan menghukum jurnalis yang dinilai kritis dan mendesak pemilik media untuk memecat mereka, mengintimidasi atau mengancam mereka dengan taktik lain, bahkan menuntut mereka dengan tuduhan pencemaran nama baik (Freedom House, 2017). Impunitas dan korupsi telah menjadi isu utama yang memprihatinkan di Meksiko. Banyak diantara jurnalis yang menyoroti atau menyelidiki kasus korupsi maupun kejahatan yang berhubungan dengan kartel narkoba atau pejabat publik menjadi sasaran ancaman atau tindakan agresif lainnya menekan untuk tidak melaporkan masalah tersebut. Menurut Rodriguez

(2016), Korupsi dalam sistem peradilan dianggap sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi kepada pengelakan impunitas negara untuk semua kejahatan termasuk *femicide*.

Intimidasi yang secara terang-terangan dilakukan menimbulkan ancaman yang signifikan, data korban oleh pemerintah Meksiko dan media Meksiko yang berfokus menyelidiki kekerasan dilaporkan secara berbeda sehingga terdapat tentang berapa banyak yang terbunuh, data yang dibatasi oleh pemerintah, serta pengaruh kartel narkoba di publik menjadikan kekerasan oleh kartel narkoba menjadi sulit untuk diukur di Meksiko. The UN *security Council* menyoroti kejahatan terorganisir khususnya perdagangan narkoba. Meningkatnya *femicide* yang terkait dengan kartel narkoba di Meksiko dimana aturan institusi hukum yang tidak memadai.

2. Sulitnya Mengidentifikasi Korban dan Pelaku *Femicide Intimo*

Di negara Amerika Latin terkhusus Meksiko masih kekurangan data statistik dan sistem informasi resmi tentang kasus *femicide intimo* masih menjadi masalah. Meksiko dinilai tidak memiliki alat dan infrastruktur dalam membedakan jenis kekerasan terhadap perempuan, mengakibatkan pendataan dan mengidentifikasi pelaku kasus menjadi sulit. UN *Women* bahkan menekankan masalah pengumpulan data yang resmi tentang *femicide intimo*. Tahun 2012 menjadi tahun resmi pemerintah Meksiko resmi melacak dan mencatat data-data korban *femicide intimo*. Menurut Rich, Casas & Brueggemann (2021), Pembunuhan terhadap perempuan meningkat sebanyak 137% diantara tahun 2015-2020.

Banyak diantara para korban tidak dapat melaporkan kekerasan yang terjadi atau mereka tidak dapat mempercayai pemerintah dalam mengatasi masalah mereka. Perspektif yang tumbuh di masyarakat bahwa penegak hukum tidak peduli akan masalah ini mempengaruhi korban serta pelaku. Selain itu, masih banyak korban yang belum teridentifikasi, meskipun korban-korban tersebut telah tergolong sebagai *femicide intimo* sesuai dengan undang-undang, namun hal tersebut tidak mendapatkan kelanjutan identifikasi. Menurut Amnesty Internasional (2021), pada tahun 2020, sebanyak 3.723 kasus *femicide* yang tercatat di Meksiko, hanya 940 kasus diantaranya diselidiki sebagai kasus *femicide*.

Pemerintah Meksiko yang masih kurang dalam pemahaman untuk membedakan atau mengukur kasus *femicide intimo*. Database yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan tentang pelaku juga tidak dapat dilakukan secara efektif akibat kurangnya data yang dapat dipercaya.

3. Tidak Efektifnya Langkah Pemerintah Meksiko dalam Mencegah *Femicide Intimo* dan Pemulihan bagi Korban

Pada tahun 2007 Undang-Undang tentang *femicide* pertama di Amerika Latin disahkan, 15 negara telah mengkriminalisasi *femicide* dalam undang-undangnya (*Economic Commission for Latin America and the Caribbean*, 2014). Meksiko mengesahkan *the General Law of Access for Women to a Life Free of Violence* (GLAWLFV) atau Undang-Undang Umum Akses bagi Perempuan untuk Kehidupan yang Bebas dari Kekerasan pada tahun 2007 sekaligus mengikuti rekomendasi dari Komite CEDAW. Namun,

lebih dari 10 tahun setelah GLAWLFV disahkan implementasi perlindungan yang disusun masih belum menjamin perlindungan terhadap kehidupan perempuan di Meksiko. Yang dibuktikan dengan jumlah kasus yang selama beberapa tahun meningkat, sesuai dengan data laporan Sekretariat Eksekutif Sistem Keamanan Publik Nasional Meksiko, jumlah kasus pada tahun 2015-2017 mencapai 1.640 kasus pada tahun 2017 meningkat sebanyak 72%.

Data dari Sekretariat Jenderal Keamanan Publik Nasional Meksiko diantara tahun 2015-2019 kasus *femicide* meningkat menjadi 983 yang sebelumnya tercatat 411 kasus. Menurut UN (2019), ada tantangan dalam menerapkan Undang-Undang Umum 2007 tentang Akses Perempuan ke Kehidupan yang Bebas dari Kekerasan dan meskipun undang-undang ini telah disahkan, situasi bagi perempuan di Meksiko makin memburuk atau terjadi peningkatan dalam kekerasan terhadap perempuan terutama *intimate femicide*.

Menurut Pasal 1 dan 2 CEDAW yang merupakan kewajiban proaktif bagi Negara-Negara pihak untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh siapapun. Dibawah perjanjian hak asasi manusia dan hukum internasional umum khusus, Negara dapat bertanggungjawab atas tindakan pribadi jika gagal bertindak dengan uji tuntas untuk pelanggaran hak atau menghukum dan menyelidiki tindakan kekerasan dan pemberian kompensasi. (CEDAW, 2018). Menurut theGuardian (2020), pemerintah Meksiko telah memotong anggaran sebanyak 75% yang ditujukan kepada institut perempuan federal di Meksiko yang

melindungi korban dari kasus *femicide intimo*, Presiden Amlo juga menyarankan untuk menarik semua dana negara untuk tempat penampungan perempuan yang melarikan diri dari kekerasan yang dioperasikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Meksiko.

Salah satu langkah mengatasi kasus *femicide intimo* yang sesuai dengan CEDAW yaitu dengan memajukan visualisasi terhadap masalah tersebut serta mengembangkan pencegahan dan hukuman. Namun, undang-undang untuk setiap KUHP tentang *femicide* berbeda di setiap negara bagian Meksiko terdapat ketidakselarasan, salah satunya masih belum ada kesepakatan secara nasional tentang apakah *femicide* merupakan kejahatan berat atas hak asasi manusia atau kategori kejahatan yang terpisah (Justice in Mexico, 2020) perbedaan pidana atau konsep *femicide intimo* di masing-masing pemerintah di negara bagian Meksiko menyebabkan kasus *femicide intimo* masih terjadi di Meksiko, selain itu pemotongan dana dari pemerintah bagi para korban *femicide intimo* akan sangat berdampak kepada pemulihan korban, sehingga implementasi CEDAW sulit diidentifikasi di tingkat nasional.

4. Minimnya *Political Will* Pemerintah Meksiko dalam Menjalankan Rekomendasi CEDAW

Femicide telah digeneralisasikan sampai tidak dapat dipahami secara objektif dan pasti. Menurut laporan *the first Worldwide Report on Burden of Armed Violence* sebelumnya antara tahun 2011-2014 Meksiko merupakan salah satu dari 5 negara di dunia dengan jumlah korban yang bertambah

cukup besar dalam kasus *femicide* dan pada tahun 2019 menempati urutan pertama diantara 24 negara di Amerika Latin dalam kasus *femicide* menurut the UN *Office for the Prevention of Crime and Drugs* (El Siglo, 2019).

Presiden Meksiko saat ini, Andres Manuel Lopez Obrador atau biasa dikenal dengan Amlo dinilai memperburuk masalah *femicide* di Meksiko selama terpilih menjadi presiden. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2019, Presiden Amlo tidak ingin berbicara tentang pembunuhan perempuan dengan isu gender serta beralih dengan kegiatan lain (Rosenbaum, 2020). Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Meksiko mengatakan bahwa data dari *femicide intimo* palsu serta mengatakan bahwa perempuan di Meksiko tidak pernah dilindungi seperti sekarang (theGuardian, 2020). Banyak aktivis dan pembela hak asasi manusia mengharapkan bahwa yang diungkapkan oleh Presiden Amlo adalah benar. Namun, di negara dimana diperkirakan terdapat 10 kasus *femicide intimo* ditemukan setiap harinya serta 93% kejahatan di negaranya tidak dihukum yang dihilangkan oleh tingkat impunitas yang masih berakar di Meksiko sudah menjadi bukti bahwa perempuan di Meksiko masih dibayangi dengan *femicide intimo*.

Menurut data analisis yang diperoleh dari *National Map of femicide* di Meksiko, pada awal pandemi COVID-19 antara 16 Maret 2020- 30 April 2020 tercatat ada 405 kasus *femicide* (Insight Crime, 2020). Pemerintah menolak untuk mengakui bahwa ada masalah kekerasan terhadap gender atau *femicide intimo* di negaranya.

UN Women di Meksiko bekerja untuk membantu pemerintah mengenai komitmen internasional tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women, n.d.) seperti memberikan pemikiran kepemimpinan dalam pengertian serta konsep *femicide*, membantu pemerintah dalam mengumpulkan data sehingga penyelidikan dapat lebih mudah dan mengatasi impunitas yang ada, membantu pemerintah dalam pengembangan penyelidikan dan penuntutan sesuai dengan Protokol CEDAW (OHCHR, 2021). Namun, usaha yang dilakukan oleh UN Women dalam mewujudkan Konvensi CEDAW tidak maksimal, karena kurangnya respon dari pemerintah untuk bekerjasama dalam kampanye kesetaraan gender kepada masyarakat dan impunitas yang masih berjalan di Meksiko. Salah satu protes terbesar yang terjadi pada Hari Perempuan Internasional pada Maret lalu, yaitu pemogokan perempuan nasional pertama di Meksiko atau "*a day without us*". Tetapi Presiden Amlo tidak menunjukkan reaksi apapun selain mencela para pengunjung rasa banyak diantaranya merupakan keluarga dari korban *femicide*, Presiden Amlo berulang kali mengatakan bahwa aktivis perempuan sebagai tindakan dari kelompok penghianat atau dimanipulasi oleh oposisi (IPI, 2021).

Pemerintah Meksiko dalam hal kesetaraan gender telah memiliki rancangan dalam mengatasi *femicide intimo*, namun rancangannya tidak dijalankan hal ini dapat dilihat dengan peran pemerintah yang tidak menindaklanjuti komitmen mereka untuk memberikan kehidupan yang aman dan bebas kekerasan bagi perempuan. Seperti yang dituliskan dalam Undang-

Undang Umum Akses bagi Perempuan untuk Kehidupan yang Bebas dari Kekerasan membutuhkan korelasi dengan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, sanksi, dan pemerintah. Undang-undang tersebut juga memerintahkan kepada semua tingkat pemerintah untuk mendata semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, bertindak dalam pencegahannya, menuntut mereka yang bertanggung jawab, dan memberikan kompensasi yang memadai kepada para korban sesuai dengan CEDAW yang telah diratifikasi oleh Meksiko.

Otoritas yang seharusnya menegakkan dan mendorong hukum dan undang-undang masih belum mengerti dan meremehkan perjuangan dan rasa sakit dari perempuan yang mengalami kekerasan *intimate femicide*. CEDAW mengidentifikasi bahwa tidak adanya mekanisme untuk mengimplemetasikan undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, pendanaan yang tidak memadai di tingkat negara bagian untuk pemantauan dan implementasi mempunyai dampak yang saling berkaitan di Meksiko. Komite CEDAW menetapkan ini berdasarkan rekomendasi umum no.19 bahwa definisi diskriminasi Pasal 1 Konvensi mencakup kekerasan berbasis gender, kekerasan ditujukan kepada seorang perempuan karena dia perempuan atau yang mempengaruhi. Meskipun Meksiko telah menempatkan undang-undang dan lembaga dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terkhusus femicide intimo, namun Meksiko gagal dalam melawan budaya ketidaksetaraan gender secara efektif yang mendorong keberlanjutan dikriminasi tersebut.

CEDAW terdiri dari 30 Pasal yang berisi tindakan yang perlu diambil oleh Negara Pihak, salah satu langkah-langkah yang penting didalamnya adalah mewajibkan Negara Pihak untuk menghilangkan stereotip laki-laki dan perempuan dan mengakui peran budaya dan tradisi dalam diskriminasi yang terjadi (Facio, 2008). Budaya *machismo* yang masih kuat diadopsi dan masih mendarah daging di Meksiko menyusun peran di sekitar perempuan sebagai yang terikat dirumah, dan laki-laki sebagai "*providers*" yang bekerja di luar rumah. *Machismo* membenarkan laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, kepercayaan yang telah tertanam bahwa mereka mempunyai hak atas perempuan menyebabkan *machismo* menjadi salah satu pendorong *femicide intimo* terus berlanjut. Masih bertahannya budaya *machismo* di Meksiko merupakan kegagalan pemerintah dalam mengambil tindakan untuk mempromosikan kesetaraan gender, menghapus diskriminasi, serta mencegah kekerasan berbasis gender terutama *femicide intimo*. Kegagalan Meksiko dalam mengambil tindakan proaktif pola perilaku sosial dan budaya yang menormalkan jenis kekerasan ini dan mendorong diskriminasi terhadap perempuan, pemerintah Meksiko sendiri mewujudkan prasangka ini dalam tanggapannya terhadap pengaduan kekerasan, yang merupakan ketidakpatuhan.

Pelanggaran yang terus berlanjut selama bertahun-tahun ini memperkuat pelanggaran yang dilakukan Meksiko terhadap CEDAW dan kegagalan negara untuk menjalankan rekomendasi dari CEDAW. Berdasarkan Rekomendasi Umum 28 CEDAW Pasal 2, bahwa Negara

mempunyai kewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum tindak kekerasan berbasis gender, juga mewajibkan Negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan baik melalui kelalaian atau tindakan, Negara juga berkewajiban untuk memberikan reaksi secara aktif terhadap diskriminasi terhadap perempuan, terlepas dari apakah kelalaian atau tindakan dilakukan oleh Negara atau oleh aktor lain (UN CEDAW, 2010).

Meskipun, Meksiko telah menempatkan undang-undang dan lembaga dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan khususnya *femicide intimo*, namun Meksiko gagal dalam melawan budaya ketidaksetaraan gender secara efektif yang mendorong keberlanjutan diskriminasi tersebut. Meksiko gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi kewajiban hukumnya untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender terkhusus *femicide intimo*. Masalah yang berkesinambungan antara Impunitas, Kartel Narkoba serta Budaya *Machismo* menjadi masalah pokok yang menyebabkan kekerasan terhadap gender atau *femicide intimo* masih berlangsung dan implementasi CEDAW menjadi terhambat di Meksiko.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Meksiko belum mampu mengatasi *femicide intimo* melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, Hal ini dikarenakan sehingga menyebabkan beberapa faktor yang menghambat dalam mengimplementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yaitu:

1. Pemerintah Meksiko gagal dalam menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia atau *femicide intimo* dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran tersebut.
2. Sulitnya mengidentifikasi korban dan pelaku *femicide intimo* oleh pemerintah Meksiko.
3. Tidak efektifnya langkah-langkah pemerintah Meksiko dalam mencegah *Femicide Intimo* dan pemulihan bagi korban.
4. Minimnya *Political Will* pemerintah Meksiko dalam menjalankan rekomendasi CEDAW.

Meksiko memiliki instrumen atau mekanisme dalam mengatasi *femicide intimo*, namun memilih untuk tidak melakukannya. Tidak diartikan bahwa Meksiko secara langsung membunuh perempuan dalam hal ini mengizinkan *femicide intimo*, tetapi kelambanan serta seolah-olah tidak menganggap

bahwa *femicide intimo* merupakan kekerasan yang berat di dalam Negaranya menyebabkan implementasi CEDAW dalam menghapus semua diskriminasi terhadap gender ini terhambat.

B. Saran

1. Dalam mengatasi masalah *femicide intimo* diperlukan kerjasama dari pemerintah, media, aktor *non-state*, dan seluruh masyarakat untuk tercapainya implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.
2. Dalam mengurangi dan mengetahui resiko perempuan pemerintah perlu membuat pencatatan atau data dari semua kasus *femicide intimo* sesuai dengan kerangka peraturan yang didukung oleh Komite *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kusumaatmaja, M. & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung.

Kusumaatmadja, M. & Agoes, E. T. (2012). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.

Suwardi, S. S. & Kurnia, I. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta Timur, Indonesia: Sinar Grafika

Sefriani. (2010). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Edisi Kedua). Depok, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.

Shackerlford, T. K. (2020). *The SAGE Handbook of Domestic Violence*. SAGE

Shepherd, L. J. (2019). *Handbook on Gender and Violence*. Handbook Chapter. Social and Political Science 2019

Pratomo, E. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*. Bandung: PT. Alumni Bandung

JURNAL

Engle, K., Miller, Z. & Davis, D. M. (2016). *Anti-Impunity and the Human Rights Agenda*. Inggris: Cambridge University Press

Doctor of criminology, University of Toronto. 2021. Interview with the Research Directorate.

The Researcher. 2021. Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Campus Morelos.

Situngkir, D. A. (2018). TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL. Vol. 2 No. 2. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Gil, V. D. Betancur, J. D. Puerta, I. C. Montoya, L. M. Sepulveda, J. M. (2018). THE FEMICIDE IN COLOMBIA AND MEXICO: A TEXT MINING ANALYSIS. p 170-177. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC*.

Gonzalez, N. (2020). Efficiency in combating femicides in the State of Mexico. *Research article: Latin American Journal of Social Research*, vol.3, no.3. hal. 1-15.

Ambos, K. & Freiburg. (1997). *Impunity and International Criminal Law*. A case study on Colombia, Peru, Bolivia, Chile and Argentina, Vol. 18, No. 1-4.

Haldemann, F., Unger, T., & Cadelo, V. (2018). *The United Nations Principles to Combat Impunity: A Commentary Oxford Scholarly Authorities on International Law - TRIAL Oxford commentaries on international law*. Inggris: Oxford University Press.

Gibbon, K. F., Walkalte, S., McCulloch, J. & Maher, J. (2018). *Intimate Partner Violence, Risk and Security: Securing Women's Lives in a Global World*. London: Routledge.

Walsh, S. D. & Menjivar. C. (2016). *“What Guarantees Do We Have?” Legal Tolls and Persistent Impunity for Femicide in Guatemala*. Latin American Politics and Society, 58:31-55

Lettieri, M. (2017). Violence Against Women in Mexico - A report on recent trends in femicide in Baja California, Sinaloa, and Veracruz. University of San Diego.

Mubarok, R. M. Eriyanti, L. D. & Iqbal, M. Kegagalan Kebijakan Pemerintah Mengatasi Krisis Femicide (The Failure of Mexico Government Policy To Overcome Femicide Crisis). Journal of Feminism and Gender Studies, Vol. 1 No. 1 Hal. 12-21

Oliva, C. M. MEXICO CASE STUDY: STEPS ON THE PATHWAY TO NO IMPUNITY - Regional Assessment of Access to Justice as a preventive mechanism to put a stop violence against women 2011-2015 UN WOMEN.

Leitmotiv Consultoria Social

OHCHR. 2020. FEMICIDE AND THE MEDIA: Do reporting practices normalize gender-based violence?

Academic Council on the United Nations System (ACUNS). 2015. Femicide Targeting of Women in Conflict a Global Issue that Demands Action. Femicide in Canada, vol. III hal. 83

Brinks, D. M. (2008). *The Judicial Response to Killings in Latin America: Inequality and the Rule of Law*. New York: Cambridge University Press.

Academic Council on the United Nations System (ACUNS) Femicide IV.
TAKING ACTION AGAINST GENDER-RELATED KILLING OF WOMEN
AND GIRLS

Toledo V. P. (2013). *Límites y dificultades en la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos sobre la tipificación del feminicidio en México: Primeras leyes y sentencias. Género, sexualidades y derechos humanos. Revista Electronica Semestral del Programa Mujeres, Género y Derechos Humanos. Dossier: violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico* Vol. 1, No. 02.

DOKUMEN

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, UNGA Res 60/147, UN Doc A/RES/60/147 (21 March 2006).

ONU-CEDAW. (2018). Committee for the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the ninth periodic report of Mexico.

CEDAW. (2016). Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

CEDAW. (2018). Concluding observations on the ninth periodic report of Mexico. Committee on the Elimination of Discrimination against Women.

CEPAL. (n.d.). Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean. United Nations.

Comisión de Human rights de las Naciones Unidas (CDHIO) (2005). Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad.

Comision Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos. 2012. Femicide and Impunity in Mexico: A context of structural and generalized violence, Report presented Before the Commintee on the Elimination of All Forms of Discrimiantion against Women

Committee of Experts of the Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention (MESECVI). (2018). Declaration on Femicide. *Adopted at the Fourth Meeting of the Committee of Experts (CEVI) August 15, 2008*

Commitee on the Elimination of All Forms Discrimination against Women. 2017. General recommendation No.35 on Gender-Based Violence.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Committee), 'General Recommendation No 25, on art. 4 , Paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, on Temporary Special Measures' (2004) UN Doc HRI/GEN/1/Rev.9 (vol II) (GR 25) [5].

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP). 2021. "Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1). Ciudad de Mexico: SESNSP.

UN Bodies. 2005. Impunity : report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher : addendum.

UN CEDAW Committee. 2010. General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. CEDAW/C/2010/47/GC.2, par. 9

UN CEDAW Committee. 2010. General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. CEDAW/C/2010/47/GC.2 par. 10

UN Commission on Human Rights. 2004. Commission on Human Rights Resolution: Impunity.

Mexico. 2017. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI).

UN Doc. 2004. Subcommittee on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities di Geneva. E/CN.4/2004/88, para 8

United Nations. 2019. Human Rights Committee. Concluding Observation on the Sixth Periodic Report of Mexico. (CCPR/C/MEX/CO/6).

United Nations. 2018. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Concluding Observations on the Ninth Periodic Report of Mexico. (CEDAW/C/MEX/CO/9).

UN Women. (2008). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

UN Women, Regional Office for Central America of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), & UNITE. n.d . Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide)

UN Women Mexico. Elimination of violence against women and girls

Utama, I. G. A. A. (2019). ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL. Vol. 1 Issue 1. *Ganesha Civic Education Journal*

World Health Organization (WHO) & (PAN) American Health Organization. 2012. Understanding and addressing violence against women - Femicide. WHO/RHR/12.38.

SKRIPSI

Armenta, R. E. C. 2021. "Femicide in Latin America - An Analysis Through Structural & Cultural Violence".

Songko, G. E. (2016). "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969".

Sterling, S. 2018. "Intimate Partner Violence in Mexico: An Analysis of the Intersections Between Machismo Culture, Government Policy, and Violence Against Women (2018)".

WEBSITE

Agren, D. (2021). *Ten women and girls killed every day in Mexico*, Amnesty report says. theGuardian. Retrieved 19 Februari 2022, from <https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/20/mexico-femicide-women-girls-amnesty-international-report>

Exhibition Museum of Memory and Tolerance UN Women. 2017. FEMICIDE IN MEXICO. Retrieved 16 Februari 2022, from <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/11/feature-prosecuting-femicide-in-mexico>

IPI Global Observatory. 2021. Impunity and Police Brutality Characterize Rise in Femicides in Mexico. Retrieved 20 Februari 2022, from <https://theglobalobservatory.org/2021/04/impunity-police-brutality-femicides-mexico/>

Justice in Mexico. 2020. Exploring the Legal Context of Femicide in Mexico. Retrieved 20 Februari 2022, from <https://justiceinmexico.org/legal-context-femicide-mexico/>

El Siglo de Torreon. 2019. Mexico, first place of femicides this year: UN. Retrieved 15 Mei 2022, from <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2019/mexico-primer-lugar-de-femicidios-este-ano-onu.html?from=old>

Amnesty International. 2021. Mexico: Failings in investigations of feminicides in the State of Mexico violate women's rights to life, physical safety and access to

justice. Retrieved 23 Januari 2022, from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/mexico-failings-investigations-femicides-state-mexico-violate-womens-rights-life-physical-safety-access-justice/>

Freedom House. 2017. Mexico Case. Freedom in the World. Retrieved 10 Februari 2022, from <https://freedomhouse.org/country/mexico/freedom-world/2021>

InSight Crime. 2020. Map Links Mexico's Femicide Crisis, Organized Crime. Retrieved 15 Februari 2022, from <https://insightcrime.org/news/analysis/mexico-femicide-organized-crime/>

Revolucionarias, Liga De Mujeres Revolucion should be Liga de Mujeres. "Femicide in Mexico: Symptom of a Sick System." In Defence of Marxism. Retrieved 6 January 2022, from <https://www.marxist.com/femicide-in-mexico-symptom-of-a-sick-system.htm>